

RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2024**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan Kabupaten yang diaplikasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Rencana Kerja ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan dan bermanfaat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun. Kami sadari bahwa rancangan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, tetapi kami yakin bahwa dokumen ini akan bermanfaat, setidaknya sebagai kerangka dasar untuk meningkatkan efisiensi perencanaan pengelolaan aktivitas kerja masing-masing satuan kerja, khususnya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta pengawasan dan pengendaliannya oleh Penanggung jawab kegiatan, maupun Pengguna Anggaran.

Tarutung, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM

NIP:19197408112003121003.-



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, RENSTRA, hasil Musrenbang Kecamatan, Program/kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan pelayanan publik, percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya menuntut banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyiapkan Desa. Pengakuan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam UU Desa menjadi pintu masuk yang membuka peluang bagi rakyat desa untuk melatih diri menjalankan otonomi mengurus rumah tangga sendiri. Desa menjalankan kewenangan lebih besar mulai dari perencanaan pembangunan sesuai



kebutuhan prioritas, pengalokasian anggaran, pelaksanaan teknis pembangunan, dan pengawasan serta evaluasinya sampai pada pertanggungjawabannya.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasilguna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Proses Penyusunannya, Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Restra Bapemmas dan Pemdes dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan



Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan dokumen Rencana Kerja

1.4. Sistematika Penyusunan

Memberikan gambaran susunan / tata urutan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN BERJALAN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Berjalan dan Capaian Renstra

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

3.1. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Berjalan dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun berjalan 2024 dapat dilihat secara rinci sebagaimana pada Lampiran “Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten”.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.1. Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk membantu dan memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun, merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tanggung Jawab :

- a. Menyusun Program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Merumuskan kebijakan pedoman teknis penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Merumuskan pembinaan tentang Pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta lembaga-lembaga desa lainnya;
- e. Merumuskan upaya pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- f. Membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- g. Merumuskan kebijakan program kerjasama bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.



1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang undang tentang desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penunjang kriteria)
3. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk sepenuhnya mampu berjalan secara optimal
5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
6. Belum optimalnya data profil data profil desa dan database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan

2.2.3. Upaya pemecahan masalah yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- a. Meningkatkan penataan dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kerjasama desa
- b. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas 4 (empat) program antara lain terlampir review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diprogramkan dalam rencana program kerja Tahun 2025. Terkait dengan peningkatan sarana prasarana Pemerintahan Desa dan peningkatan biaya operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa termasuk menyangkut penghasilan tetap



Pemerintahan Desa dan honor BPD direncanakan dialokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terangkum dalam musrenbang Kecamatan akan ditelaah dan disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagian besar kegiatan yang diusulkan dapat di anggarkan dalam kegiatan yang ditampung dalam kegiatan Dana Desa dan ADD Tahun 2025.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara selalu melakukan sinergi dengan kebijakan nasional terutama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah dan berdasarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara untuk : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sasaran yang direncanakan yaitu :

1. Meningkatkan status desa
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana kerja tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu cakupan layanan penunjang yang tertangani.

Kegiatan antara lain :

2.13.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.13.01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah

2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan
- 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
- 2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Kegiatan antara lain :
 - 2.13.03 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Indikator program administrasi pemerintahan desa yaitu persentase BUMDes aktif, persentase SiLPA penggunaan APBDes dan Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK
 - Kegiatan antara lain :
 - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - 2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan



4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu persentase BUMDesMa aktif dan persentasw lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif

Kegiatan antara lain :

2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah terlampir



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem perencanaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan yang sinergis, berkesinambungan dan optimal, serta menjadi bagian dari perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tarutung, *Jawaei* 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM
PEMBINA
NIP:197408112003121003.-



LAMPIRAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan/output/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja Per Triwulan 2024																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 14 = 13/5 x 100%	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%) 15=12/7 x 100%				
					6			7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 x 6										
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
34		Penyenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Desa yang tersusun	242 Laporan	6.672.018.200	240	6.701.452.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	6.701.452.624	99%	100,44%	0%	0,0%				
35		Finalisasi Penyusunan Profil Desa	Laporan Dokumen Profil Desa	1205 Dokumen	419.102.900	798	257.728.550	64	7.009.725	8	Dokumen	8	Dokumen	15	Dokumen	1.054.500	4	Dokumen	2.857.000	35	Dokumen	5.911.500	833	281.640.050	69%	62,43%	55%	55,8%		
36		Adanya fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan organisasi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi	100 persen	3.491.372.620	200%	3.312.844.490	100%	147.499.900	25	persen	25	persen	108.617.330	25	persen	8.185.700	25	persen	27.612.525	100	persen	144.419.555	100	3.457.264.045	100%	99,02%	100%	97,9%	
37		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	100	persen	3.491.372.620	101	3.312.844.490	100%	147.499.900	25	persen	25	persen	108.617.330	25	persen	8.185.700	25	persen	27.612.525	100	persen	144.419.555	100	3.457.264.045	100%	99,02%	100%	97,9%
38		Facilitasi penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	5	Dokumen	243.750.000	4	310.277.509	1	25.000.000	0	Dokumen	1	Dokumen	25.000.000	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	25.000.000	5	335.277.509	100%	187,53%	100%	100,0%			
39		Facilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	48	bulan	1.563.051.820	25	1.446.210.870	12	97.918.400	3	bulan	3	bulan	67.856.130	3	bulan	5.172.200	3	bulan	22.801.525	12	bulan	93.934.855	37	1.542.145.725	77%	98,66%	100%	98,0%
40		Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang dititikatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang dititikatkan kapasitasnya	3200	lembaga	1.306.839.900	2115	1.122.139.161	195	19.892.000	0	lembaga	30	lembaga	12.951.200	82	lembaga	3.012.500	83	lembaga	3.275.000	195	lembaga	19.238.700	3.210	1.141.377.861	72%	87,34%	100%	96,7%
41		Facilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil Facilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	693	Dokumen	377.730.900	645	434.216.950	2	4.689.500	1	Dokumen	Dokumen	2.810.000	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	1.436.000	2	Dokumen	4.246.000	647	438.462.950	99%	116,08%	100%	90,5%		
42		terselenggaranya fasilitasi kerja sama desa	calupan kerjasama desa yang difasilitasi	100	persen	1.452.058.292	100%	733.950.768	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	733.950.768	100%	50,53%	0%	0%	
43		Facilitasi Kerjasama antar desa	terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa	100	persen	1.452.058.292	100%	733.950.768	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
44		Facilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	48	Dokumen	1.452.058.292	31	733.950.768	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0%	0%	
TOTAL				23.690		24.951.547.212	17.474	21.735.995.630	100%	3.487.544.833	100	persen	100	persen	688.877.377	100	persen	688.770.468	100	persen	933.136.118	78,8	persen	3.410.379.375	8	28.665.532.694	94%	94%		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	3,807,780,226	APBD		100%	3,685,000,000
	2.13.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja	1 Tahun	42,999,800	APBD	1 Tahun	17,000,000
	2.13.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,999,800	APBD	1 Laporan	5,000,000
	2.13.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	38,000,000	APBD	12 laporan	12,000,000
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	3,200,039,027	APBD	1 Tahun	3,050,000,000
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,153,451,427	APBD	31 Orang/bulan	3,000,000,000
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	40,587,600	APBD	12 Dokumen	45,000,000
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1 laporan	6,000,000	APBD	1 laporan	5,000,000
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi umum	1 Tahun	239,994,225	APBD	1 Tahun	198,000,000
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	9,997,600	APBD	4 paket	5,000,000
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	29,999,625	APBD	4 paket	15,000,000
	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	15,000,000	APBD	4 paket	7,000,000
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	15,000,000	APBD	4 paket	15,000,000
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 dokumen	9,998,000	APBD	12 Dokumen	6,000,000
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	159,999,000	APBD	12 Laporan	150,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88,731,700	APBD		100% 181,000,000
	2.13.01.2.07.06	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	17,446,800	APBD		5 unit 45,000,000
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangb disediakan	7 unit	71,284,900	APBD		2 unit 136,000,000
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan kantor	1 Tahun	141,009,600	APBD		1 Tahun 149,000,000
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1,000,000	APBD		1 Laporan 8,000,000
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	30,800,000	APBD		1 Laporan 32,000,000
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	109,209,600	APBD		12 Laporan 109,000,000
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya pemeliharaan	1 Tahun	95,005,874	APBD		1 Tahun 90,000,000
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	70,035,474	APBD		8 unit 70,000,000
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	14,971,600	APBD		1 unit 15,000,000
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	9,998,800	APBD		14 unit 5,000,000
2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	jumlah kerjasama desa yang aktif	4 kerjasama	4,899,000	APBD		4 desa 40,000,000
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa	4 dokumen	4,899,000	APBD		100% 40,000,000
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	4,899,000	APBD		15 Dokumen 40,000,000
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase BUMDes yang aktif ; persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK ; persentase SILPA penggunaan APBDes	50% ; 90% ; 2%	129,562,000	APBD		55% ; 95% ; 1,5% 560,000,000
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	100%	129,562,000	APBD		100% 560,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	50 Dokumen	30,000,000	APBD		160 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 dokumen	40,000,000	APBD		7 dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	29,576,000	APBD		50 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	2 dokumen	9,987,000	APBD		241 dokumen	70,000,000
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	5 desa	5,000,000	APBD		50 desa	50,000,000
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	4,999,000	APBD		1 dokumen	40,000,000
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif ; persentase BUMDes bersama yang aktif	90% ; 15%	296,835,528	APBD		92% ; 20%	620,000,000
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif	100%	296,835,528	APBD		100%	620,000,000
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	25,000,000	APBD	hibah	1 dokumen	100,000,000
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	156 lembaga	20,000,000	APBD		195 lembaga	100,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	206,838,528	APBD		1 unit	300,000,000
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2 dokumen	9,999,000	APBD		2 dokumen	40,000,000
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	1 laporan	4,998,000	APBD		1 Laporan	30,000,000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	30,000,000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen	20,000,000
				4,239,076,754				4,905,000,000